



PEMERINTAHAN KOTA SINGKAWANG

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



Bkpsdm.singkawang.kota.go.id



[Bkpsdm.skw](https://www.instagram.com/Bkpsdm.skw)



[Bkpsdm singkawang](https://www.facebook.com/Bkpsdm.singkawang)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah SWT, yang mana atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Badan Kepegawaian DAN Pengembangan Kota Singkawang Tahun 2022. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja ini merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah, yang mana proses dalam penyusunan rencana kerja ini berdasarkan kebutuhan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra perangkat daerah. Mendukung melaksanakan arah kebijakan dan strategi perangkat daerah yang menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dituangkan melalui program dan kegiatan mewujudkan tujuan akhir dari proses pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2023.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan.

Singkawang, 2022
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kota Singkawang

Drs. ZULHIAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19681223 198908 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	40
3.3. Program dan Kegiatan	40
3.4. Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.....	41
3.5. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan.....	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2022	7
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM Kota Singkawang.....	17
Tabel 2.3.	Permasalahan dan Faktor Yang Mempengaruhi	20
Tabel 2.4	Rincian Anggaran Program dan Kegiatan	23
Tabel 2.4	Reviu Terhadap RKPD Tahun 2023	23
Tabel 3.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024	42
Tabel 4.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah BKPSDM Tahun 2023	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Disamping itu Rencana Kerja Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Yang dimaksud berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah adalah dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan yang dimaksud berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan adalah bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dan disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi dan memastikan kesesuaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan rancangan akhir RKPD. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan turunan dari Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun. Dokumen Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dengan berpedoman pada RKPD dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD yang telah ditetapkan melalui Pemerintah Kota menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang;
13. RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026; dan
14. Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan rancangan rencana kerja tahun 2023;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023;
3. Evaluasi hasil Rencana Kerja tahun lalu; dan
4. Evaluasi hasil Rencana Kerja tahun berjalan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang adalah:

1. Terlaksananya rencana kerja pembangunan daerah Kota Singkawang;
2. Tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang;
3. Terlaksananya program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang di tahun 2023; dan
4. Tercapainya sasaran dan target program kegiatan tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Pelaksanaan rencana kerja haruslah memperhatikan capaian rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada APBD tahun berjalan dan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya. Pencapaian rencana kerja juga harus memperhatikan sasaran dan target program kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat tercapai.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu, dan realisasi rencana strategis mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang. Laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah memuat sasaran strategis dan indikator sasaran dengan melakukan pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja. Laporan kinerja ini juga merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggung jawaban kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Berhasil atau tidaknya rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang dapat dilihat dari pencapaian hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu. Berikut ini disajikan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja tahun 2021:

Tabel 2.1.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Singkawang

Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2022		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11		12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200 %	28%	100 %	57 %	57%	13 %	13	%	13%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun	200 %	50%	100 %	100 %	100%	75 %	75	%	75%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja SKPD	2 Dok					2 Dok	2	Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%				
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	2 Dok	50%	1 Dok	1 Dok	100%		-	Dok	0%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Dok	67%	6	Dok	8	Dok	133%	6	Dok	6	Dok	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja (PMPRB)	1	Dok									-	Dok	0%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan yang disediakan	24	Bln	50%	12	Bln	12	Bln	100%	3	Bln	3	Bln	25%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	24	Bln	50%	12	Bln	12	Bln	100%	3	Bln	3	Bln	25%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan	24	Bln	50%	12	Bln	12	Bln	100%			-	Bln	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	Dok	50%	1	Dok	1	Bln	100%	1	Dok	1	Bln	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200	%	50%	100	%	100	%	100%	0	%	-	%	0%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah SKPD	2	Dok	50%	1	Dok	1	Dok	100%			-	Dok	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang disediakan	200	%	49%	100	%	98	%	98%	-	%	0	%	0%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	80	Stel	49%	40	Stel	39	Dok	98%			-	Dok	0%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	orang											
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum pada BKPSDM	200	%	50%	100	%	100	%	100%	25	%	25	%	25%

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	200	%	50%	100	%	100	%	100%	-	%	0%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan alat tulis kantor yang disediakan Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Cakupan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan	24	Bln	50%	12	Bln	12	Bln	100%	3	Bln	25%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan peralatan rumah tangga yang disediakan	200	%	50%	100	%	100	%	100%			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	200	%	50%	100	%	100	%	100%	25	%	25%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	200	%	50%	100	%	100	%	100%	25	%	25%
	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan bahan/material yang disediakan untuk kegiatan	100	%									
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	200	%	50%	100	%	100	%	100%	11	%	11%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya arsip dinamis	12	Bln							-	%	0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Sarana dan Prasarana BKPSDM Kota Singkawang	130	unit	15%	30	unit	20	unit	67%	8	unit	27%
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	10	unit							1	unit	10%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor, gedung	70	unit	43%	30	unit	30	unit	100%	7	unit	18%

		diklat dan asrama diklat yang diadakan									
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor, gedung diklat dan asrama diklat yang diadakan	40 unit								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200 %	50%	100 %	100 %	100%	25 %	25	%	25%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan	200 %	50%	100 %	100 %	100%	8 %	8	%	8%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	200 %	50%	100 %	100 %	100%	12 %	12	%	12%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan jasa kebersihan kantor yang disediakan Cakupan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	200 %	50%	100 %	100 %	100%	- %	-	%	0%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan jasa retribusi kebersihan yang disediakan Cakupan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran yang disediakan Cakupan makanan dan minuman yang disediakan	24 Bln	50%	12 Bln	12 Bln	100%	3 Bln	3	Bln	23%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	200 %	55%	100 %	109 %	109%	25 %	25	%	25%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan Cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	200 %	50%	100 %	100 %	100%	14 %	14	%	14%

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan gedung kantor, gedung diklat dan asrama diklat yang dipelihara	200 %	50%	100 %	100 %	100%		-	%	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan perlengkapan gedung kantor, gedung diklat dan asrama diklat yang dipelihara	200 %	50%	100 %	100 %	100%	-	-	%	0%
	Penataan Organisasi	Persentase Jumlah Dokumen Analisa Beban Kerja, Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan	200 %	50%	100 %	100 %	100%		-	%	0%
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen analisa dan evaluasi jabatan	2 dok	50%	1 dok	1 dok	100%	- dok	-	dok	0%
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2 dok					- dok	-	dok	0%
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Pelaksana dan Fungsional;	190 %	66%	95 %	125 %	132%	2 %	2	%	2%
		Persentase Fasilitasi Pelayanan Pembinaan dan Kinerja ASN	180 %	50%	90 %	90 %	100%	3 %	3	%	3%
		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian;	200 %	69%	100 %	138 %	138%	2 %	2	%	2%
		Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;	130 %	77%	65 %	100 %	154%	- %	-	%	0%
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan Pelaksanaan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	200 %	69%	100 %	138 %	138%	2 %	2	%	2%
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen perumusan kebijakan pengadaan ASN	1 Dok						-	lap	0%
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Laporan Penyusunan Formasi Kebutuhan Pegawai ASN Pemerintah	2 lap	50%	1 lap	1 lap	100%		-	lap	0%

		Kota Singkawang									
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS yang mengalami perubahan status menjadi PNS dan mengikuti sumpah/janji PNS Jumlah penerimaan Calon PPPK Kota Singkawang Jumlah penerimaan CPNS Kota Singkawang	700 org 500 org 200 org	35% 24% 123%	306 org 165 org 116 org	245 org 122 org 245 org	80% 74% 211%				
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang diproses usul pensiunnya	440 org	41%	180 org	180 org	100%	19 org	19	org	6%
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem Aplikasi Database Kepegawaian	2 aplikasi	50%	1 aplikasi	1 aplikasi	100%				
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah PNS yang difasilitasi penerbitan identitas kepegawaian Jumlah profil kepegawaian dan DUK PNS yang disusun	580 org 35 buku	50% 57%	290 org 20 buku	290 org 20 buku	100% 100%	- Org - Buku	- -	org buku	0% 0%
	Mutasi dan Promosi ASN	Cakupan Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	1910 org	68%	1030 org	1.291 org	125%	15 org	15	org	2%
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang dimutasi dalam internal OPD, antar OPD dan antar instansi sesuai dengan kelas dan pemangku jabatan	300 org	55%	150 org	164 org	109%	15 org	15	org	9%

	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang difasilitasi kenaikan pangkat dan pindah golongan Jumlah PNS yang difasilitasi ujian kenaikan pangkat dan ujian penyesuaian ijazah	800 org 360 org	77% 92%	400 org 180 org	400 org 165 org	100% 92%	- org - org	- org - org	0% 0%
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS yang mengalami perubahan dalam proses pengembangan karir melalui jabatan pengawas, administrator dan JPT	450 org	125%	300 org	562 org	187%	- org	- org	0%
	Pengembangan Kompetensi ASN	Cakupan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	485 org	51%	245 org	245 org	100%	0 org	0 org	0%
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar, ijin belajar dan ikatan dinas	25 org	60%	15 org	15 org	100%	- Org	- org	0%
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pembinaan jabatan fungsional ASN	70 org							
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang mengalami perubahan dalam proses pengembangan karir melalui pengembangan aparatur jabatan fungsional	460 org	50%	230 org	230 org	100%	- Org	- org	0%
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pembinaan dan Kinerja ASN	200 %	45%	100 %	90 %	90%	3 %	3 %	3%
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	3 dok					- Dok	- org	0%

Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang menyampaikan LHKPN dan Dokumen penilaian kinerja	112 unit kerja	50%	56 unit kerja	56 unit kerja	100%	- unit kerja	- unit kerja	0%
		682 org	50%	341 org	341 org	100%	- org	- org	0%
		272 dok	24%	136 dok	64 dok	47%	- dok	- dok	0%
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen evaluasi hasil penilaian dan evaluasi aparatur	4 dok							
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang menerima penghargaan	360 org		120 org	120 org	100%	17 org	17 org	14%
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PNS yang cuti, yang dibina dan ditangani kasusnya	72 org		65 org	65 org	100%	4 org	4 org	6%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Fasilitas Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN; Persentase CPNS Yang Mengikuti Pelatihan Dasar	150 %	67%	75 %	100 %	133%	5 %	5 %	6%
		200 %	50%	100 %	100 %	100%	- %	0 %	0%
Pengembangan Kompetensi Teknis	Cakupan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi teknis ASN	42 org	52%	22 org	22 org	100%	1 org	1 org	5%
Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah PNS yang difasilitasi mengikuti pengembangan kompetensi	42 org	52%	22 org	22 org	100%	1 org	1 org	5%

	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Cakupan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Manajerial	469 org	36%	168 org	168 org	100%	- org	-	org	0%
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar	423 org	34%	142 org	142 org	100%	- org	-	org	0%
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS yang difasilitasi mengikuti pelatihan dasar Jumlah PNS yang di Fasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan	46 org	57%	26 org	26 org	100%	- Dok	-	org	0%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsinya bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang hanya melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan, yang tidak menggunakan indikator rencana kerja pembangunan daerah seperti, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar Pelayanan Kerja (NSPK). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan adalah Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan Indikator penunjang urusan pemerintahan daerah.

Tabel 2.2.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2019	2020	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepegawaian					A	A	A			A	
2.	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN					95%	95%	50.50%			100%	
3.	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial					75%	75%	55.22%			100%	
4.	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional					85%	88.75%	85%			100%	
5.	Persentase penanganan kasus yang diselesaikan					90%	90%	100%			100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau Lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang.

Isu-isu strategis pembangunan di Kota Singkawang yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang adalah:

1. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara; dan

2. Perlu adanya penguatan kelembagaan.

Tujuan yang telah dirumuskan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dan tertuang didalam Renstra Perubahan 2023-2026 adalah “Terwujudnya Penataan Sistem Manajemen SDM ASN”.

Sasaran yang ingin dicapai dalam manajemen kepegawaian adalah:

1. Terwujudnya Pelayanan administrasi Kepegawaian Yang Berkualitas;
2. Terpenuhinya Kebutuhan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; dan
3. Terpenuhinya Pembinaan ASN;

Strategi dan arah kebijakan mencakup metode atau pendekatan yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan secara komprehensif agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dari hasil analisis permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam lima tahun ke depan.

Adapun revisi strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang Tahun 2023-2026, dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Sasaran 1 : Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang berkualitas.
Strategi : Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian.
Kebijakan : Melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan data dan sistem informasi kepegawaian.
- 2 Sasaran 2 : Terpenuhinya kebutuhan ASN sesuai dengan kompetensi.
Strategi : Melaksanakan kompetensi sesuai kebutuhan.
Kebijakan :
 1. Memfasilitasi tugas belajar, ijin belajar dan ikatan dinas;
 2. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pengembangan kompetensi PNS melalui pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan kepemimpinan dan ikatan dinas; dan
 3. Melaksanakan pengembangan karir dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional
- 3 Sasaran 3 : Terpenuhinya pembinaan ASN.

- Strategi : Melaksanakan pembinaan ASN.
- Kebijakan : 1. Melaksanakan pembinaan disiplin ASN;
2. Melakukan pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN;
dan
3. Melakukan penegakan disiplin, pemberian penghargaan dan perlindungan.

Dikaitkan dengan upaya untuk mengatasi permasalahan dalam pencapaian hasil kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang prima, maka sudah saatnya dipertimbangkan adanya strategi khusus yang penerapan manajemen aparatur dengan mempertimbangkan pada asass kepastian hukum, profesionalisme, proporsionalisme, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan serta kesetaraan dan kesejahteraan perlu dioptimalkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka untuk mengoptimalkan hasil kinerja dari setiap aparatur, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam penataan birokrasi dan organisasi.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM dalam pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Permasalahan dan Faktor Yang Mempengaruhi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kualitas kepegawaian	Manajemen kepegawaian belum optimal	Tidak meratanya distribusi pegawai antar Perangkat Daerah
		Kurangnya SDM di berbagai posisi
Belum optimalnya kompetensi ASN	Belum optimalnya peningkatan	Belum optimalnya fasilitas diklat yang dimiliki BKPSDM

	kompetensi ASN	Belum Optimalnya Kapasitas dan Kompetensi Pengelola Diklat
--	----------------	--

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rumusan usulan program dan kegiatan yang dituangkan dalam rancangan awal RKPD adalah suatu tahapan yang digunakan bagi Perangkat Daerah untuk memuat kebutuhan rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya. Tahapan penyusunan rencana kerja ini melalui proses penyandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penjelasan mengenai analisa kebutuhan rencana kerja perangkat daerah tersebut dilakukan bilamana adanya temuan-temuan rencana kerja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Tabel 2.4.
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kota Singkawang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5	3				KEPEGAWAIAN					KEPEGAWAIAN					
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Singkawang	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.200.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Singkawang	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.200.000.000	
5	3	1	2	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun	100%	45.099.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun	100%	45.099.300	
5	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.000.000	
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	

5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA0-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA0-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.600.000	
5	3	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	7.499.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	7.499.300	
5	3	1	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Administrasi Keuangan yang disediakan	100%	3.511.090.050	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Administrasi Keuangan yang disediakan	100%	3.511.090.050	
5	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	3.410.423.550	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	3.410.423.550	
5	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	95.166.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	95.166.500	
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.500.000	
5	3	1	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah yang di	100%	5.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah yang di	100%	5.000.000	

			3			laporkan					laporkan			
5	0	0	2	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan barang milik daerah SKPD	1 Laporan	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan barang milik daerah SKPD	1 Laporan	5.000.000
5	3	1	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Persentase administrasi kepegawaian yang disediakan	100%	61.112.471	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Persentase administrasi kepegawaian yang disediakan	100%	61.112.471
5	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang diadakan	40 Stel	33.220.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang diadakan	40 Stel	33.220.000
5	0	0	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	27.892.471	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	27.892.471
5	3	1	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Persentase Administrasi Umum Yang disediakan	100%	676.266.279	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Persentase Administrasi Umum Yang disediakan	100%	676.266.279
5	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	44.348.614	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	44.348.614
5	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	23.595.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	23.595.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Singkawang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	147.420.449	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Singkawang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	147.420.449
5	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	47.036.992	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	47.036.992
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	3.865.224	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	3.865.224
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	5.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	5.000.000

5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	400.000.000	
5	0	0	2	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Singkawang	Tersusunnya arsip dinamis	1 Dokumen	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Singkawang	Tersusunnya arsip dinamis	1 Dokumen	5.000.000	
5	3	1	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Sarana dan Prasarana yang tersedia	100%	253.734.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Sarana dan Prasarana yang tersedia	100%	253.734.900	
5	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	70.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	70.000.000	
5	0	0	2	0	Pengadaan Mebel	Kota Singkawang	Jumlah mebeleur yang diadakan	10 Unit	30.460.100	Pengadaan Mebel	Kota Singkawang	Jumlah mebeleur yang diadakan	10 Unit	30.460.100	
5	0	0	2	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		-	
5	0	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor, gedung diklat dan asrama diklat yang diadakan	10 Unit	98.274.800	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor, gedung diklat dan asrama diklat yang diadakan	10 Unit	98.274.800	
5	0	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah perlengkapan gedung kantor, gedung diklat dan asrama diklat yang diadakan	5 Unit	55.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah perlengkapan gedung kantor, gedung diklat dan asrama diklat yang diadakan	5 Unit	55.000.000	
5	3	1	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	330.097.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	330.097.000	
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.915.969	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.915.969	
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	288.586.031	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	288.586.031	

							yang Disediakan					yang Disediakan			
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	23.595.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	23.595.000	
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000	
5	3	1	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	302.600.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	302.600.000	
5	0	0	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Singkawang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Singkawang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.000.000	
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	85.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	85.000.000	
5	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Singkawang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	
5	0	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	72.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	72.600.000	
5	3	1	2	1	Penataan Organisasi	Kota Singkawang	Persentase Jumlah Dokumen Analisa Beban Kerja, Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan	100%	15.000.000	Penataan Organisasi	Kota Singkawang	Persentase Jumlah Dokumen Analisa Beban Kerja, Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan	100%	15.000.000	

5	0	0	2	0	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Singkawang	Dokumen analisa dan evaluasi jabatan	1 Dokumen	5.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Singkawang	Dokumen analisa dan evaluasi jabatan	1 Dokumen	5.000.000	
5	0	0	2	0	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Dokumen Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Dokumen Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	
5	0	0	2	0	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Singkawang	Dokumen PMPRB Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Singkawang	Dokumen PMPRB Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000	
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian;	75%	3.100.000.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian;	75%	3.100.000.000	
5	3	2	2	0	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Pelaksanaan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	627.117.430	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Pelaksanaan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	627.117.430	
5	0	0	2	0	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 dokumen	6.245.250	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 dokumen	6.245.250	
5	0	0	2	0	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jumlah, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	58.425.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jumlah, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	58.425.000	
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	258 dokumen	358.143.400	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	258 dokumen	358.143.400	
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	183 dokumen	25.350.400	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	183 dokumen	25.350.400	
5	0	0	2	0	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Singkawang	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	150.420.480	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Singkawang	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	150.420.480	

5	0	0	2	1	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	310 dokumen	28.532.900	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	310 dokumen	28.532.900	
5	3	2	2	0	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Pelayanan Kepegawaian yang sesuai SOP	100%	1.134.599.980	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Pelayanan Kepegawaian yang sesuai SOP	100%	1.134.599.980	
5	0	0	2	0	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksanaan dan Mutasi ASN antar Daerah	200 dokumen	20.520.350	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksanaan dan Mutasi ASN antar Daerah	200 dokumen	20.520.350	
5	0	0	2	0	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Singkawang	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	450 orang	164.079.630	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Singkawang	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	450 orang	164.079.630	
5	0	0	2	0	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Singkawang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	200 dokumen	950.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Singkawang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	200 dokumen	950.000.000	
5	3	2	2	0	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	100%	850.000.000	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	100%	850.000.000	
5	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	10 orang	500.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	10 orang	500.000.000	
5	0	0	2	1	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN fungsional yang dibina	40 orang	200.000.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Jumlah ASN fungsional yang dibina	40 orang	200.000.000	
5	0	0	2	1	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	200 orang	150.000.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	200 orang	150.000.000	
5	3	2	2	0	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Singkawang	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	488.282.590	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Singkawang	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	488.282.590	
5	0	0	2	0	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Singkawang	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	200.000.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Singkawang	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	200.000.000	

5	0	0	2	0	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	479 dokumen	141.618.130	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	479 dokumen	141.618.130	
5	0	0	2	0	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	60.000.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	60.000.000	
5	0	0	2	0	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	400 orang	21.179.210	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	400 orang	21.179.210	
5	0	0	2	0	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Singkawang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 orang	50.485.250	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Singkawang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 orang	50.485.250	
5	0	0	2	0	Pelayanan Proses izin perceraian pegawai		Jumlah Dokumen proses izin perceraian pegawai yang di layani	15 dokumen	15.000.000	Pelayanan Proses izin perceraian pegawai		Jumlah Dokumen proses izin perceraian pegawai yang di layani	15 dokumen	15.000.000	
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi manajerial, Latsar dan Fungsional	78%	4.000.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi manajerial, Latsar dan Fungsional	78%	4.000.000.000	
5	4	2	2	0	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Singkawang	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN	100%	820.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Singkawang	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN	100%	820.000.000	
5	0	0	2	0	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	1 dokumen	20.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	1 dokumen	20.000.000	

5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Singkawang	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	80 orang	180.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Singkawang	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	80 orang	180.000.000	
5	0	0	2	0	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah dokumen hasil pembinaan, pengoordinasian, fasilitas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	50 orang	620.000.000	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah dokumen hasil pembinaan, pengoordinasian, fasilitas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	50 orang	620.000.000	
5	4	2	2	0	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase CPNS Yang Mengikuti Pelatihan Dasar dan Pengembangan Kompetensi Manajerial	55%	3.180.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase CPNS Yang Mengikuti Pelatihan Dasar dan Pengembangan Kompetensi Manajerial	55%	3.180.000.000	
5	0	0	2	0	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang disusun	1 dokumen	30.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang disusun	1 dokumen	30.000.000	

5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Singkawang	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	3 laporan	1.850.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Singkawang	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	3 laporan	1.850.000.000	
5	0	0	2	0	Pembinaan, Penguasaan, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Singkawang	Jumlah dokumen hasil pembinaan, koordinasi, fasilitas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerja sama	78 dokumen	1.300.000.000	Pembinaan, Penguasaan, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Singkawang	Jumlah dokumen hasil pembinaan, koordinasi, fasilitas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerja sama	78 dokumen	1.300.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat pemerintah daerah, Renstra Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang Tahun 2023-2026, mencerminkan bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Secara spesifik program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis merupakan upaya untuk mewujudkan sasaran dan tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sinkronisasi antara program dan kegiatan yang dimuat dalam rencana strategis akan memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan.

Disisi lainya Renstra Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang Tahun 2018-2022, dalam implementasinya tidak dapat dipisahkan dari norma, peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pembinaan aparatur sipil negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara. Oleh sebab itu Rencana Strategis Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang secara nasional juga memiliki hubungan yang signifikan dengan dokumen Rencana Strategis kementerian/kelembagaan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang Tahun 2023-2026, disinkronisasikan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dan Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan. Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang meliputi 3 (tiga) kementerian/ kelembagaan yaitu:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina Aparatur Sipil Negara Kementerian PAN-RB dalam dokumen Renstra Kemenpan-RB Tahun 2020-2024 memiliki visi "Mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi" dan untuk pencapaian Visi tersebut Kemenpan-RB menurunkan 4 (empat) misi yakni;

1. Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;

2. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif;
3. Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien; dan
4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Dalam hal pencapaian atas Visi dan Misi Kemenpan-RB melakukan tujuan strategis, yaitu:

- a. terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing; dan
- b. terwujudnya Kementerian PANRB yang berkualitas dan kapabel

Tujuan strategis terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing yang akan dicapai memuat 6 (enam) sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang sederhana, responsif, adaptif dan partisipatif;
Dengan kegiatan utamanya:
 - 1) Penyusunan kebijakan kelembagaan instansi pemerintah;
 - 2) Penataan organisasi pemerintah, termasuk: penggabungan dan penghapusan organisasi pemerintah yang tidak produktif, serta mewujudkan birokrasi 2 level;
 - 3) Pengaturan hubungan kewenangan yang sinergis antara instansi pusat dan daerah;
 - 4) Evaluasi dan penyederhanaan proses bisnis instansi dan antar-instansi (sinergi antar K/L, antar daerah, antara pusat/daerah); dan
 - 5) Penyusunan, asistensi, dan evaluasi kebijakan SPBE, sehingga tercipta sistem informasi yang terintegrasi, terpadu, dan handal.
2. Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral melalui penerapan sistem merit dalam manajemen ASN;
Dengan kegiatan utamanya:
 - 1) Penyusunan dan penerapan kebijakan manajemen talenta dan pola karier ASN nasional;
 - 2) Penguatan jabatan fungsional;
 - 3) Pelaksanaan penerimaan ASN;
 - 4) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengembangan kapasitas ASN 20 JP/tahun dengan pendekatan pembelajaran corporate university;
 - 5) Implementasi Human Capital Development Plan (HCDP) Nasional;
 - 6) Reformasi sistem gaji, tunjangan, dan fasilitas ASN;
 - 7) Reformasi sistem pensiun dan jaminan hari tua ASN;
 - 8) Penyusunan kebijakan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - 9) Penguatan kebijakan netralitas ASN; dan
 - 10) Pelaksanaan Anugerah ASN.

3. Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif dan akuntabel;
Dengan kegiatan utamanya:
 - 1) Pengembangan kebijakan SAKIP untuk mewujudkan pelaksanaan APBN yang fokus dan tepat sasaran;
 - 2) Pembinaan implementasi SAKIP;
 - 3) Evaluasi pelaksanaan SAKIP; dan
 - 4) Penguatan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi (e-performance based budgeting).
4. Terwujudnya pengawasan yang andal, efektif dan berintegritas;
Dengan kegiatan utamanya:
 - 1) Penyusunan dan evaluasi kebijakan pengawasan nasional;
 - 2) Penguatan integritas unit kerja layanan percontohan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - 3) Pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan pengawasan dan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - 4) Peningkatan kualitas tindak lanjut pengaduan masyarakat dan aparatur; dan
 - 5) Penetapan dan pemantauan kebijakan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN).
5. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima; dan
Dengan kegiatan utamanya:
 - 1) Penyederhaan dan pengintegrasian pelayanan publik pusat-daerah, antara lain melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - 2) Pengembangan model e-services;
 - 3) Peningkatan penanganan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N-LAPOR!);
 - 4) Pembinaan inovasi pelayanan publik melalui kompetisi, replikasi, dan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP);
 - 5) Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKM, Standar Pelayanan, SIPP, dan Forum Konsultasi Publik;
 - 6) Penyempurnaan/revisi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik; dan
 - 7) Evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Terselenggaranya reformasi birokrasi nasional secara efektif dan efisien;
Dengan kegiatan utamanya:
 - 1) Penetapan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional 2019-2024;
 - 2) Penguatan kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional;

- 3) Penguatan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan RB nasional melalui penguatan kelembagaan dan proses bisnis pelaksana RB Nasional (KPRBN, TRBN, UPRBN, Tim Teknis);
- 4) Pembinaan teknis/pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional; dan
- 6) Pelaksanaan knowledge sharing tentang best practices pelaksanaan RB.

Tujuan strategis terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing yang akan dicapai memuat 4 (empat) sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang sederhana, responsif, adaptif dan partisipatif;
2. Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral;
3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan Kementerian PANRB yang andal, efektif dan berintegritas; dan
4. Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kementerian PANRB yang prima.

Dengan kegiatan utamanya:

- 1) Penyederhanaan struktur organisasi dan proses bisnis Kementerian PANRB;
 - 2) Pelaksanaan manajemen talenta di lingkungan Kementerian PANRB;
 - 3) Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Individu;
 - 4) Penerapan performance based budgeting di lingkungan Kementerian PANRB;
 - 5) Optimalisasi Sistem Pengawasan;
 - 6) Pengembangan Aplikasi e-SALAM guna meningkatkan pelayanan Kementerian PANRB;
 - 7) Peningkatan kualitas tata kelola SPBE Kementerian PANRB; dan
 - 8) Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan Kementerian PANRB.
2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 81/KEP/2020, tentang rencana strategis Badan Kepegawaian Nasional tahun 2020 – 2024 Visi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2015 – 2019 adalah: “Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”.

Pencapaian strategis diatas yang bersifat impact (sasaran ultimate), berikut ini sasaran intermediate yang akan dicapai dalam Program BKN yang dapat berfungsi dan memiliki manfaat

terhadap capaian sasaran strategis. Sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi BKN adalah:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN;
2. Keandalan sistem informasi ASN;
3. Meningkatnya disiplin pegawai;
4. Meningkatnya profesionalisme ASN;
5. Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan berbasis manajemen mutu;
6. Meningkatnya pelayanan pembinaan PNS;
7. Terwujudnya BKN yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Visi sebagaimana diuraikan di atas, dirumuskan misi BKN sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Kepegawaian.
 2. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.
 3. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Peraturan Perundang- Undangan, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai.
 4. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
 5. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Manajemen Internal BKN.
2. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Dengan mempertimbangkan peran LAN dalam pembangunan nasional dan program reformasi birokrasi nasional, visi LAN 2020-2024 merupakan gambaran atas kondisi, posisi, dan peran LAN dalam kedua kerangka kebijakan tersebut dirumuskan sebagai berikut. “Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government.

Dalam visi tersebut, terkandung 4 (empat) elemen utama, yaitu

Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia: Menurut Garvin, institusi pembelajar adalah institusi yang terampil menciptakan, memperoleh dan mentransfer pengetahuan dan mengubah perilakunya berdasarkan pengetahuan dan wawasan barunya. Insan LAN yang menyadari pentingnya peningkatan kapasitas diri dan organisasi serta berkomitmen untuk terus menerus belajar hal-hal baru, baik konsepsi, kebijakan, perkembangan kondisi regional dan global maupun isu-isu aktual dan proyeksi ke depan, sehingga LAN mampu merespons dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan nasional. LAN bergerak untuk mendukung pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, dan berwawasan global yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik.

Mampu Menjadi Penggerak Utama: Penggerak utama dalam arti LAN sebagai Pembina Diklat, Pembina Widyaiswara dan Pembina Analis Kebijakan, mengambil peran strategis dalam mengakselerasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta menjadi mitra yang andal bagi instansi pemerintah dan non-pemerintah dalam pengembangan administrasi negara melalui pengembangan kualitas kebijakan dan SDM kediklatan maupun Analis kebijakan.

World Class Government: World class government diwujudkan melalui pengembangan kompetensi aparatur, Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara yang Berkualitas. Dalam hal ini, LAN berperan sebagai Lembaga think tank yang memberikan saran dan rekomendasi kebijakan dan inovasi administrasi negara, Pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi SDM Aparatur. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Perpres Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara. Mewujudkan World Class Government tentunya harus didasari oleh institusi yang mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21, LAN terus berupaya menghadirkan Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas dan mampu adaptif dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi sehingga mampu melahirkan SDM Aparatur Unggul yang mampu mewujudkan World Class Government.

1. Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong LAN senantiasa mendukung Visi Misi yang akan dilaksanakan pada periode Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin tahun 2020-2024. Visi Misi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025.
2. Untuk mewujudkan visi LAN dan mendukung visi Presiden, LAN melaksanakan misi Presiden dan wakil presiden nomor 1 yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia yaitu.
3. Misi 1 Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional.
4. Misi 2 Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analis kebijakan yang kompeten.
5. Misi 3 Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi.
6. Misi 4 Mewujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, untuk mencapai target maka rumusan yang terdapat dalam RPD adalah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi. Sedangkan rumusan tujuan didalam Renstra BKPSDM Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah **terwujudnya penataan sistem manajemen SDM ASN** dengan indicator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Area Penataan Sistem Manajemen SDM.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh BKPSDM Kota Singkawang secara nyata dalam jangka waktu tahunan sampai 4 tahun mendatang. Pada RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2023, untuk mencapai target maka sasaran diuraikan dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- c. Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal.

Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kota Singkawang Tahun 2023-2026 setelah adanya perubahan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang berkualitas.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian.
2. Terpenuhinya kebutuhan ASN sesuai dengan kompetensi.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - Persentase pemenuhan kebutuhan ASN;
 - Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial;
 - Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis dan fungsional.
3. Terpenuhinya pembinaan ASN.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator yaitu Persentase penanganan kasus yang diselesaikan.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana kerja (renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Singkawang mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang untuk mencapainya dalam satu tahun dan merupakan tolak ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode.:

3.4. Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Berdasarkan visi dan misi Walikota, maka prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran daerah yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan.

2. Kebijakan Anggaran

Sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Kabupaten sangat terbatas sehingga ditetapkan program dan kegiatan dengan prioritas anggaran diutamakan pada kegiatan pokok yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah, maka ditetapkan pagu indikatif. Kebijakan atas pagu indikatif dilakukan melalui proses penganggaran, yaitu dengan memperkirakan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan

3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka pada tahun anggaran 2021, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merencanakan 3 (tiga) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 58 (Lima Puluh Delapan) Sub Kegiatan . Rencana anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut disusun berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta prakiraan maju pada tahun anggaran berkenaan.

3.5. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Program/kegiatan dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 mengacu pada RKPD 2023. Faktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain adalah : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian prioritas dan sasaran daerah, pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama), pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerinah pusat serta Pemerintah Kota Singkawang.

Anggaran untuk melaksanakan 3 (tiga) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan. kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023.

Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022:

Tabel. 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
KOTA SINGKAWANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu indikatif (Rp)	Ket.
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	3					KEPEGAWAIAN		
5	3	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.200.000.000	
5	3	1	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.099.300	
5	03	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.000.000	
5	03	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	
5	03	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	5.000.000	
5	03	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	
5	03	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	
5	03	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.600.000	
5	3	1	2.01	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.499.300	
5	3	1	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.511.090.050	
5	03	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.410.423.550	
5	03	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.166.500	
5	03	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.500.000	
5	3	1	2,03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000	
5	03	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	
5	3	1	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.112.471	

5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.220.000	
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.892.471	
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	676.266.279	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.348.614	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.595.000	
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	147.420.449	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.036.992	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.865.224	
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.734.900	
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	30.460.100	
5	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
5	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.274.800	
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000	
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.097.000	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.915.969	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288.586.031	
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.595.000	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000	
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.600.000	
5	03	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.600.000	
5	3	1	2.13		Penataan Organisasi	15.000.000	
5	03	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5.000.000	
5	03	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5.000.000	
5	03	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5.000.000	
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.100.000.000	
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	627.117.430	
5	03	02	2.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	6.245.250	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	58.425.000	

5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	358.143.400	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	25.350.400	
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	150.420.480	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	28.532.900	
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	1.134.599.980	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	20.520.350	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	164.079.630	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	950.000.000	
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	850.000.000	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	500.000.000	
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	200.000.000	
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	150.000.000	
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	488.282.590	
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	200.000.000	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	141.618.130	
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60.000.000	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	21.179.210	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	50.485.250	
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses izin perceraian pegawai	15.000.000	
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.000.000.000	
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	820.000.000	
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	20.000.000	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	180.000.000	
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	620.000.000	
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.180.000.000	
5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	30.000.000	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.850.000.000	
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.300.000.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Disamping itu, Perangkat daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang.

Perangkat daerah dalam mencapai diperkuat dengan penjelasan-penjelasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Demi mewujudkan rencana kerja pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah juga melakukan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan program serta kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	LOKASI	PENERIMAA MANFAAT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN MAJU	SUMBER ANGGARAN	KETERANGAN
								OUTPUT KEGIATAN					
								TOLAK UKUR	TARGET				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	3				KEPEGAWAIAN								
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.200.000.000	6.200.000.000		
5	3	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		ASN di BKPSDM dan Pemkot Singkawang	Cakupan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang disusun	100%	45.099.300	49.609.230		
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Singkawang		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.000.000	12.100.000	DAU	
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Singkawang		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000	DAU	
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Singkawang		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000	DAU	

5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Singkawang		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000	DAU	
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		ASN di BKPSDM dan ASN Pemkot Singkawang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA0-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000	DAU	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Singkawang		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.600.000	7.260.000	DAU	
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	7.499.300	8.249.230	DAU	
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Singkawang		Cakupan Administrasi Keuangan yang disediakan	100%	3.511.090.050	3.862.199.055	DAU	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Singkawang		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	3.410.423.550	3.751.465.905	DAU + PAD	
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	95.166.500	104.683.150	DAU	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		ASN di BKPSDM dan Pemkot Singkawang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.500.000	6.050.000	DAU	
5	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Singkawang		Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah yang di laporkan	100%	5.000.000	5.500.000		
5	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		ASN di BKPSDM	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.500.000		
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Singkawang		Persentase administrasi kepegawaian yang disediakan	100%	61.112.471	64.434.471	DAU	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Singkawang		Jumlah pakaian dinas yang diadakan	40 Stel	33.220.000	36.542.000	DAU	

5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		ASN di BKPSDM dan ASN Pemkot Singkawang	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	27.892.471	27.892.471		
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Singkawang		Persentase Administrasi Umum Yang disediakan	100%	676.266.279	743.892.905	DAU	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Singkawang		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	44.348.614	48.783.475	DAU	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	23.595.000	25.954.500		
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	147.420.449	162.162.493		
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Singkawang		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	47.036.992	51.740.691	DAU	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Singkawang		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	3.865.224	4.251.746	DAU	
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kota Singkawang		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	5.000.000	5.500.000	DAU	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Singkawang		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	400.000.000	440.000.000	DAU	
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Singkawang		Tersusunnya arsip dinamis	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000	DAU	
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Singkawang		Cakupan Sarana dan Prasarana yang tersedia	100%	253.734.900	759.897.640	DAU	
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		ASN di BKPSDM dan ASN Pemkot Singkawang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	70.000.000			
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kota Singkawang		Jumlah mebeleur yang diadakan	10 Unit	30.460.100	60.030.611	DAU	

5	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		-	533.399.512	DAU	
5	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Singkawang		Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor, gedung diklat dan asrama diklat yang diadakan	10 Unit	98.274.800	105.967.517	DAU	
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		ASN di BKPSDM dan ASN Pemkot Singkawang	Jumlah perlengkapan gedung kantor, gedung diklat dan asrama diklat yang diadakan	5 Unit	55.000.000	60.500.000		
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	330.097.000	363.106.699	DAU	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Singkawang		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.915.969	14.207.565	DAU	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Singkawang		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	288.586.031	317.444.634	DAU	
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	23.595.000	25.954.500		
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Singkawang		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000	5.500.000	DAU	
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	302.600.000	334.860.000		
5	03	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.000.000	50.000.000		
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		ASN di BKPSDM dan ASN Pemkot Singkawang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	85.000.000	85.000.000		
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Singkawang		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	120.000.000	DAU	

5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	72.600.000	79.860.000		
5	3	1	2.13		Penataan Organisasi	Kota Singkawang		Persentase Jumlah Dokumen Analisa Beban Kerja, Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan	100%	15.000.000	16.500.000	DAU	
5	03	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			Dokumen analisa dan evaluasi jabatan	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000		
5	03	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Singkawang		Dokumen Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	5.500.000	DAU	
5	03	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		ASN di BKPSDM	Dokumen PMPRB Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000		
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kota Singkawang		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian;	75%	3.100.000.000	3.150.000.000	DAU	
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Singkawang		Persentase Pelaksanaan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	627.117.430	689.310.048	DAU	
5	03	02	2.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 dokumen	6.245.250	6.350.650		
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		ASN Pemkot Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jumlah, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	58.425.000	64.267.500		
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Singkawang		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	258 dokumen	358.143.400	393.957.740	DAU	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Singkawang		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	183 dokumen	25.350.400	27.885.440	DAU	
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Singkawang		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	150.420.480	165.462.528	DAU	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	310 dokumen	28.532.900	31.386.190		
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN			Persentase Pelayanan Kepegawaian yang sesuai SOP	100%	1.134.599.980	1.152.649.571		

5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksanaan dan Mutasi ASN antar Daerah	200 dokumen	20.520.350	22.161.978		
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Singkawang		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	450 orang	164.079.630	180.487.593	DAU	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Singkawang		Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	200 dokumen	950.000.000	950.000.000	DAU	
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	100%	850.000.000	850.000.000		
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Singkawang		Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	10 orang	500.000.000	500.000.000	DAU	
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			Jumlah ASN fungsional yang dibina	40 orang	200.000.000	200.000.000		
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		ASN Pemkot Singkawang	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	200 orang	150.000.000	150.000.000		
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Singkawang		Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	488.282.590	458.040.381	DAU	
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Singkawang		Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	200.000.000	200.000.000	DAU	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	479 dokumen	141.618.130	104.209.475		
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Singkawang		Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	60.000.000	60.000.000	DAU	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		ASN Pemkot Singkawang	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	400 orang	21.179.210	23.297.131		
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Singkawang		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 orang	50.485.250	55.533.775	DAU	
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses izin perceraian pegawai	Kota Singkawang		Jumlah Dokumen proses izin perceraian pegawai yang di layani	15 dokumen	15.000.000	15.000.000	DAU	

5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kota Singkawang						DAU	
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		ASN Pemkot Singkawang	Persentase Fasilitas Pelayanan Pengembangan Kompetensi manajerial, Latsar dan Fungsional	78%	4.000.000.000	4.100.000.000		
5	4	2	2,01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Singkawang		Persentase Fasilitas Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN	100%	820.000.000	920.000.000	DAU	
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Singkawang		Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	1 dokumen	20.000.000	20.000.000	DAU	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Singkawang		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	80 orang	180.000.000	200.000.000	DAU	
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Penguasaan, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Singkawang		Jumlah dokumen hasil pembinaan, penguasaan, fasilitas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	50 orang	620.000.000	700.000.000	DAU	
5	4	2	2,02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Singkawang		Persentase CPNS Yang Mengikuti Pelatihan Dasar dan Pengembangan Kompetensi Manajerial	55%	3.180.000.000	3.180.000.000	DAU	
5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang disusun	1 dokumen	30.000.000	30.000.000		

5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	3 laporan	1.850.000.000	1.850.000.000		
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Penguasaan, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Jumlah dokumen hasil pembinaan, koordinasi, fasilitas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerja sama	78 dokumen	1.300.000.000	1.300.000.000		

BAB V

PENUTUP

Rancangan akhir Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang Tahun 2023 memuat program kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rancangan akhir Renja disusun berpedoman kepada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang dan RKPD Kota Singkawang. Rancangan akhir Renja menjadi sangat penting artinya untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah. Penyusunan Renja merupakan salah bentuk pertanggungjawaban atas program kerja menuju aparatur pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel. Disamping itu Renja juga merupakan tolak ukur capaian kinerja, baik yang dilakukan secara individu, tim maupun institusi dalam periode 1 (satu) tahun ke depan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, catatan penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang Tahun 2023 adalah pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara dan penerapan sistem merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara belum terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu diperlukan kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Disamping itu, Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Dengan melakukan perubahan dalam pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara dan penerapan sistem merit diharapkan mampu menghasilkan aparatur yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya perubahan pengelolaan manajemen tersebut pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ke depannya perlu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, disertai dengan dukungan anggaran yang memadai untuk mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik.